

Presiden Jokowi Minta Pembahasan RUU Perampasan Aset Dipercepat

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam penyampaian hasil kerja dan rekomendasi tim tersebut, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memberikan respons khusus terhadap Undang-Undang Perampasan Aset.

"Presiden juga merespon secara khusus rekomendasi Tim terkait pentingnya UU perampasan aset yang saat ini RRU-nya telah dikirimkan ke DPR," kata Mahfud melalui keterangannya, Jumat (15/9).

Bahkan, kata Mahfud, Presiden Jokowi mendorong agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat segera melakukan pembahasan terkait undang-undang tersebut. "Dan meminta kepada tim untuk ikut mendorong percepatan pembahasannya,"

ucapnya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum melaporkan hasil kerja Tim kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (14/9).

"Saya mengawali laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil kerja oleh masing-masing perwakilan Kelompok Kerja (Pokja), secara berturut-turut oleh Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Maria SW Sumardjono, Dr. Yunus Husein, dan Prof Susi Dwi Harijanti," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, presiden pun mengapresiasi dan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Tim yang bekerja intensif selama 3 bulan itu.

"Presiden meminta Tim untuk menyusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya.

● han

Eks Mentan Amran Sulaiman Dipanggil ke Istana, Ada Apa?

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/9).

Amran menyatakan, ia dipanggil Jokowi ke istana untuk membahas mengenai masalah ekonomi, khususnya soal apa yang dialami oleh masyarakat di akar rumput.

"Ya saya kan sekarang jadi pengusaha, jadi diskusi mengenai masalah ekonomi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana kondisi di daerah, tentang bahas masalah itu," kata Amran saat meninggalkan istana, Jumat (15/9) sore.

Amran membantah ketika ditanya kedatangan ke istana karena kembali ditawarkan untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi. Ia mengaku sudah sering dipanggil Jokowi untuk membicarakan beragam isu ekonomi, antara lain soal pabrik gula, nikel, dan biofuel.

"Tidak tidak (ditawari

jadi menteri), memang bukan satu kali saja, kalau tidak salah selama saya tidak menjabat sudah lima kali (bertemu)," ujar Amran.

Ia juga mengelak saat ditanya soal ada atau tidaknya pembicaraan mengenai pemilihan presiden saat bertemu Jokowi.

Pertemuannya dengan Jokowi turut membahas potensi ekonomi kawasan Indonesia timur.

Ia menyebutkan, kawasan Indonesia timur kaya akan sumber daya alam berupa nikel yang bisa diolah menjadi baterai kendaraan listrik maupun kendaraan listrik lewat proses hilirisasi.

"Ini luar biasa dan penting dimanfaatkan, ini Indonesia timur bisa menjadi episentrum ekonomi baru bahkan untuk nasional, bahkan untuk dunia, karena adanya sumber daya alam yang kalau nikel ini kita hilirisasi," kata Amran. ● mei

KPU: 7 Caleg DPR Harus Diganti karena Tidak Penuhi Syarat

JAKARTA (IM) - Sebanyak 7 calon sementara DPR RI harus diganti karena tak memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dan klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti adanya 28 masukan masyarakat yang masuk selama 19-28 Agustus 2023, terhadap daftar calon sementara (DCS) yang sebelumnya sudah ditetapkan.

"Apabila berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat mengenai DCS, dan

hasil klarifikasi itu terbukti bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka caleg tersebut harus diganti," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Jumat (15/9).

Sayangnya Idham tak menjelaskan lebih jauh siapa saja 7 calon sementara yang harus diganti oleh partai politik yang bersangkutan, dan atas alasan apa. Penggantian ini dilakukan per Kamis (14/9), dan selanjutnya KPU RI bakal memverifikasi para calon pengganti ini.

Total, 7 calon sementara yang mesti diganti itu. Sementara itu, 21 calon sementara yang sebelumnya juga diduga tak memenuhi syarat berdasarkan hasil tanggapan masyarakat, dinyatakan KPU RI tetap memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi mereka.

Sebanyak 21 calon sementara itu tersebar di PDI-P (6), Partai Golkar (3), Nasdem (3), Gerindra (2), PKB (2), PPP (2), Perindo (1), Gelora, dan Demokrat (1). ● mei

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15 September 2023 No. 563, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. Mulia Inti Bersama, berkedudukan di Jakarta Barat. Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. Mulia Inti Bersama

PENGUMUMAN

Guna memenuhi Pasal 149 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka likuidator dari PT. Laut Selatan Shipping (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 71 tertanggal 31 Mei 2023, dengan ini menyempatkan rencana pembagian aset sebagai hasil dari likuidasi Perseroan yaitu hasil perhitungan atas kekayaan Perseroan kepada para kreditor dan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau keberatan atas rencana pembagian aset sebagai hasil dari likuidasi Perseroan, dapat menghubungi Likuidator/Direksi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Pengumuman ini ke alamat Ruko Garden Shopping Arcade No. 09 CK Central Park Posdamora City Jakarta Barat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 14 September 2023

Direksi
PT. Laut Selatan Shipping
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN PT. INTERNATIONAL AUTOPARTS (Dalam Likuidasi)

Sehubungan dengan proses likuidasi harta kekayaan PT. INTERNATIONAL AUTOPARTS (Dalam Likuidasi), Likuidator menerangkan bahwa Perseroan tidak mempunyai hutang kepada Pihak Ketiga dan tidak ada sisa pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 149 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 16 September 2023
Likuidator

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



NOTA KESEPAHAMAN Mendukung Pemilu Dan Pilkada

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (kiri), bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kedua kanan), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kedua kiri), Kepala PPKAT Ivan Yustiavandana (kanan) berbincang usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (15/9). Nota Kesepahaman tersebut antara KPU dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PPKAT mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Kericuhan di Rempang, PBNU Minta Pemerintah Utamakan Musyawarah

PBNU dorong pemerintah segera memberi solusi soal ricuh di Rempang, dan kelompok yang lemah dipenuh haknya dan diberi afirmasi serta fasilitas. PBNU berpendapat, pemerintah tetap memiliki kewenangan mengambil-alih tanah rakyat asal sesuai ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

JAKARTA (IM) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut bersuara terkait konflik warga Pulau Rempang versus aparat pemerintah. Kericuhan tersebut diduga karena kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

PBNU mengeluarkan lima sikap yang terkait peristiwa itu, salah satunya meminta agar pemerintah mengutamakan musyawarah dalam setiap pembangunan, termasuk PSN. Tindakan represif aparat kepolisian dan perlawanan warga adalah akibat dari pola komunikasi yang kurang baik dari pemerintah.

"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif (kekerasan)," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Selain itu, PBNU juga berpendapat bahwa tanah yang sudah dikelola masyarakat selama bertahun-tahun baik melalui redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, hukum pengambilan tanah oleh pemerintah adalah haram.

Kendati demikian, PBNU

menegaskan hukum haram tersebut jika pengambilalihan tanah dilakukan secara sewenang-wenang.

"Hasil Bathsul Masail tersebut tidak serta merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil-alih tanah rakyat dengan syarat pengambilalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," ucap Gus Yahya.

"Dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan," katanya.

Sikap ketiga PBNU yaitu mendorong agar pemerintah segera memperbaiki pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan Rempang. Juga memastikan agar kelompok yang lemah dipenuh hak-haknya dan diberikan afirmasi serta

fasilitas.

"Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemalahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam," tutur Gus Yahya.

Terakhir, PBNU menyatakan sikap selalu mengawal perjuangan rakyat mendapatkan keadilan dengan cara sesuai kaidah hukum dan konstitusi.

"Selanjutnya, PBNU juga mengimbau kepada masyarakat Rempang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah, serta tetap memelihara sikap husnuzan

terhadap pemerintah dan aparat keamanan," ujar Gus Yahya.

Bentrokan yang terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan tim gabungan aparat penegak hukum, Kamis (7/9), karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang. ● mei

Polisi Tangkap Tersangka Pembunuh Sopir Taksi Online di Pasar Minggu

JAKARTA (IM) - Tersangka pembunuh sopir taksi online, yang jenazah ditemukan di dekat Komplek Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah ditangkap aparat kepolisian. Saat ini, kasusnya tengah ditangani Polda Metro Jaya.

"Perkembangannya sudah tertangkap pelakunya," ujar Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu, AKP Sofyan Suri saat dikonfirmasi, Jumat (15/9).

Namun, AKP Sofyan tidak bisa berbicara banyak lantaran kasusnya saat ini telah ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dia juga tak bisa merincikan waktu dan lokasi penangkapan terduga pelaku.

Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary menambahkan, kasus dugaan kasus pembunuhan tersebut telah diambil alih oleh jajaran Polda Metro Jaya. Saat ini, polisi tengah mendalami dan mengembangkan lebih lanjut kasus tersebut.

"Polda yang tangani, mohon waktu, masih dikembangkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang sopir taksi online, MSD ditemukan tewas di dekat Komplek Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan.

Korban diduga dibunuh di lokasi kejadian lantaran menjadi sasaran perampokan mobil.

Untuk diketahui, kasus ini bermula dengan ditemukannya mayat seorang pria berinisial MSD di pinggir jalan sekitar Kompleks Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ternyata sopir taksi online. MSD diduga korban pembunuhan dan perampokan. Dugaan itu diperkuat dari rekaman CCTV di sekitar lokasi.

"Di sini ada CCTV di rumah pojok, arahnya ke sini (TKP). Saya sempat dikasih lihat rekaman CCTV sama polisi dari Polda. Itu kelihatan semua kejadiannya," ujar salah satu warga setempat, Kamis (17/8) lalu.

Warga yang pertama kali menemukan jenazah korban itu sempat diperlihatkan rekaman CCTV oleh polisi yang menggambarkan saat mobil bergerak ke lokasi kejadian hingga saat korban diseret dan dibuang.

Dia menambahkan, korban yang merupakan seorang driver taksi online itu diduga dibunuh di lokasi kejadian. Selain itu, korban juga diduga korban perampokan. Mobil yang dirampok terduga pelaku dan berhasil dibawa kabur itu Toyota Veloz berplat nomor B 2166 KIL.

"Saya panggil sekuriti, RT, RW, datang tuh. Enggak lama polisi juga datang. Jadi sarannya memang kelihatannya perampasan mobil," katanya. ● lus

FOTO: ANTARA



PEMENANG LOMBA PEMBINAAN SATUAN PASMAR 2

Komandan Pasmar 2 Brigien TNI (Mar) Y. Rudi Sulistiyanto (kedua kiri) menyerahkan tropi juara lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Pasmar 2 di Lapangan Sepak Bola Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/9). Lomba Pembinaan Satuan (Binsat) Pasmar 2 tersebut sebagai juara pertama Yonif 3 Marinir, juara kedua Yonif 1 Marinir dan juara ketiga Yonif 5 Marinir.

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa para pemegang saham PT SELARAS BANTEN BERSAMA, berkedudukan di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta ("Perseroan"), bermaksud mengalihkan saham dalam Perseroan yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Kepada para kreditor yang keberatan atas pengalihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini:

PT SELARAS BANTEN BERSAMA
Rukan SOHO Central 88 Blok D No. 398
Jl. Trembesi RT.000 RW.000,
Pademangan Timur, Pademangan
Jakarta Utara, DKI Jakarta
14410

Uj. Direksi
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 16 September 2023
Direksi PT Selaras Banten Bersama